

**BARGAINING POWER PEREMPUAN DALAM  
KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN  
DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR  
SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh :

**DIAN NOVI ASRINI**  
06 193 099



**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

## ABSTRAK

**DIAN NOVI ASRINI, 06193099, Jurusan Ilmu Politik, FISIP-UNAND Padang. Dengan judul skripsi: Bargaining Power Perempuan dalam Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan). Dibimbing oleh; Drs. Wahyu Pramono, M.si dan Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA. Skripsi ini terdiri dari 107 halaman dengan referensi 9 Buku Teori, 5 Metode, 2 Jurnal, 2 Skripsi, 6 Situs Internet.**

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang *Bargaining Power* perempuan dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Fokus penelitian ini di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya adalah melihat kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia yang sampai saat ini masih memprihatinkan. Kondisi kemiskinan ini sangat tergambar di perdesaan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data yang menyatakan bahwa kemiskinan paling banyak terletak di perdesaan. Selain itu, dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terjadi kemacetan dalam hal pengembalian yang disebabkan adanya penunggakan dari ibu-ibu penerima manfaat. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana *bargaining power* perempuan dalam program simpan pinjam, di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini mengacu pada konsep *bargaining power*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa *bargaining power* perempuan dalam kegiatan simpan pinjam ini terlihat sangat lemah dari awal peminjaman sampai kepada pengembalian, kebanyakan penyebab dari ibu-ibu ini tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut karena faktor suami yang mendominasi kehidupannya. Adapun kendala yang dihadapi adalah adanya beberapa kelemahan dalam komunikasi yang tidak jalan antara pengurus sehingga terjadi miskomunikasi yang berakibat berlarut-larutnya masalah penunggakan, lemahnya Sumber daya dari kelompok serta tidak adanya kriteria dalam merekrut anggota menyebabkan pencapaian sasaran untuk rumah tangga miskin tidak maksimal, Disposisi dari kelompok ini tidak jelas, Struktur organisasi pun tidak berperan sebagaimana mestinya sehingga kemacetan pengembalian uang SPP tersebut tidak bisa terselesaikan karena memang dari pengurusnya sendiri yang tidak mau tahu tentang penunggakan kelompok.

Kata kunci: PNPM Mandiri Perdesaan, Tawar Menawar Kekuasaan, Perempuan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Persoalan kemiskinan sering dipahami sebagai suatu persoalan yang bersifat kompleks, multi dimensi, dan struktural sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif. Hingga saat ini, persoalan kemiskinan masih memerlukan waktu untuk mengatasinya. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan<sup>1</sup> yang tepat harus memadukan aspek-aspek kesadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Menurut Tjokrowinoto, kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*)<sup>2</sup> semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*)<sup>3</sup>, ketidakberdayaan (*powerless*)<sup>4</sup>, tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian penghasilannya

---

<sup>1</sup> Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

<sup>2</sup> Kesejahteraan (*welfare*) merupakan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

<sup>3</sup> Kerentanan (*vulnerability*) merupakan ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen, atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga miskin itu. Kerentanan dapat juga dikatakan merupakan kondisi dimana suatu keluarga miskin tidak memiliki kesiapan baik mental maupun material dalam menghadapi situasi sulit yang dialaminya. Kerentanan ini sering menimbulkan kondisi memprihatinkan yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan aset produksinya sehingga mereka makin rentan dan tidak berdaya.

<sup>4</sup> Ketidakberdayaan (*powerless*) yakni ketidakberdayaan keluarga miskin, salah satunya tercermin dalam kasus dimana elit desa dengan seenaknya memfungsikan diri sebagai oknum yang menjaring bantuan yang sebenarnya diperuntukkan untuk orang miskin. Ketidakberdayaan keluarga miskin di kesempatan yang lain mungkin dapat dilihat dalam hal seringnya keluarga miskin ditipu dan ditekan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Ketidakberdayaan sering pula mengakibatkan terjadinya bias bantuan untuk si miskin kepada kelas di atasnya yang seharusnya tidak berhak memperoleh subsidi, seperti kasus dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>5</sup>

Masalah kemiskinan yang terus melanda negeri ini menuntut peran pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat untuk segera berusaha mengatasinya. Bagaimanapun harus disadari bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah pusat, melainkan justru yang terpenting harus menjadi prioritas perhatian masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri.

Sudah sejak dulu, pemerintah berusaha menaggulangi kemiskinan. Sudah banyak pula kebijakan atau program<sup>6</sup> yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.<sup>7</sup> Akan tetapi, kebijakan-kebijakan atau program-program tersebut dinilai masih belum efektif dalam menanggulangi kemiskinan karena sampai saat ini, kemiskinan masih menjadi masalah di Indonesia.

Dengan demikian, maka untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja pada tanggal 12 September 2006, Tim Koordinasi Pengendali Kemiskinan (TKPK) menyatakan sepakat mengenai “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)” sebagai instrumen dalam

---

<sup>5</sup>Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Gaya Media, Yogyakarta, 2007, hal 7.

<sup>6</sup>Diantaranya adalah Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada tahun 2003, program pemberian bantuan beras kepada penduduk miskin sejak tahun 1998, yang disebut Program Raskin, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilaksanakan mulai tahun 2006, dan masih banyak lagi.

<sup>7</sup>Asmawi, *Pemetaan Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya yang Berbasis Intitusi Lokal Dan Berkelanjutan Dalam Era Otonomi Daerah Di Sumatera Barat*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Jakarta Timur, 2006, hal 73-77.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana *bargaining power* perempuan dalam kegiatan simpan pinjam perempuan dan melihat kendala program pemberian pinjaman modal untuk kelompok perempuan (SPP) tersebut. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada Kelompok SPP ini tentang bagaimana *bargaining power* perempuan dan kendala apa yang mereka hadapi dalam pengembalian uang SPP dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. *Bargaining power* perempuan dalam kegiatan Simpan Pinjam ini terlihat memang sangat lemah sekali, kebanyakan penyebab dari ibu-ibu ini tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut karena faktor suami yang mendominasi kehidupan mereka, ibu-ibu ini tidak diperbolehkan untuk melunasi pinjaman disebabkan karena dari awal proses peminjaman, *bargaining power* ibu-ibu ini sudah lemah sehingga sampai tahap pengembalian pun akan tetap seperti itu. *Bargaining power* perempuan yang lemah ini menyebabkan tidak luasnya para ibu-ibu mempergunakan uang pinjaman tersebut, semua selalu dipinjam oleh suami untuk keperluan lainnya. Sebaik atau sabanyak apapun *bargaining* yang diberikan oleh ibu-ibu ini namun tetap saja yang lebih berkuasa dalam suatu rumah tangga adalah suami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Laboratorium Sosiologi FISIP Unand: Padang.
- Asmawi. 2006. *Pemetaan Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya yang Berbasis Intitusi Lokal dan Berkelanjutan dalam Era Otonomi Daerah di Sumatera Barat*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial: Jakarta Timur.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualiasasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Maleong, Lexy. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mosse, Julia Cleves. 2002. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muniarti, A. Nununk. 2004. *Getar Gender 1*. Magelang: Indonesiatera.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Getar Gender 2*. Magelang: Indonesiatera.
- Satori, Dja'an. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soetjipto, Ani Dwiyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Buku Kompas.
- Sugiyono. 2005. *Memahami penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta: Bandung.
- Suhartini, dkk. 2005. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: PT Pelangi Aksara.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.